



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa

# EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

**TOLAK GRATIFIKASI** **JANGAN MEMBERI JANGAN MENERIMA**

**BERANI NJURJ HEBAT, INI PELAYANAN KAMI**

The banner features three circular icons: a crossed-out hand holding a stack of money, a hand with a red 'N' and 'KORUPSI' text, and a hand holding a torch.



# AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

**Reform**



**Pemenuhan**

**KOMPONEN  
PENGUNGKIT**

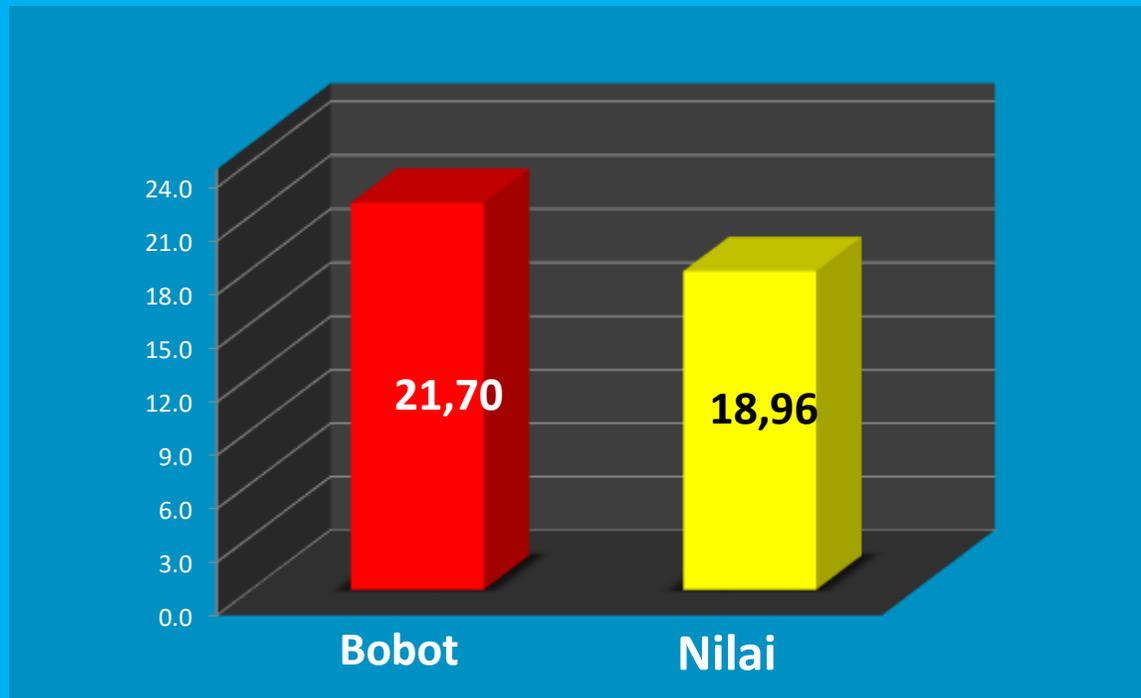
<b>1. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>	<b>3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	<b>4. PENATAAN TATA LAKSANA</b>
<b>5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<b>6. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	<b>7. PENGUATAN PENGAWASAN</b>	<b>8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>

# PROGRESS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

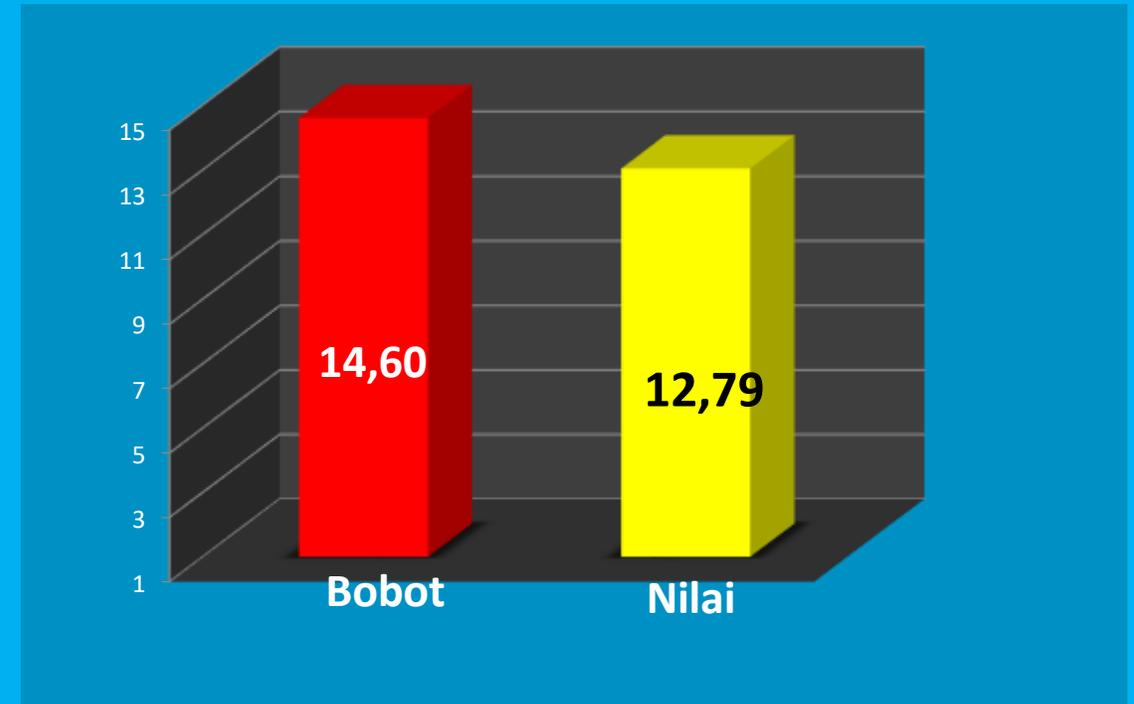


Disnaker Kab. Kebumen Tahun 2022 yaitu **31,75** dari nilai maks **36,30** atau **87,48%** dengan kategori **A**  
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

## REFORM



## PEMENUHAN



# Tabel Index Reformasi Birokrasi Unit Disnaker Kabupaten Kebumen

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>36,30</b>	<b>31,75</b>
<b>A.</b>	<b>PEMENUHAN</b>	<b>14,60</b>	<b>12,79</b>
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,68
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	075
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	200
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,84
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,19
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,65
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,19



# Tabel Index Reformasi Birokrasi Unit Disnaker Kabupaten Kebumen

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
B.	REFORM	21,70	18,96
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,75
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	0,75
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,63
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,39
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	375

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

# 1. MANAJEMEN PERUBAHAN

- ✓ Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi
- ✓ Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
- ✓ Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
- ✓ Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF MANPOWER AND INDUSTRIAL RELATIONS  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL SERVICE REFORM  
JANUARY 2012

**TERTANGGUNG**

PERNYATAAN TERAHUTAN DAN TERAHUTAN REFORMASI BIROKRASI  
SARUKAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

NO	NO	NO	NO
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12



# 2. DEREGULASI KEBIJAKAN

Sudah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan kebijakan/peraturan yang tidak harmonis yaitu Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia sedangkan aturan baru UU No. 18 tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai



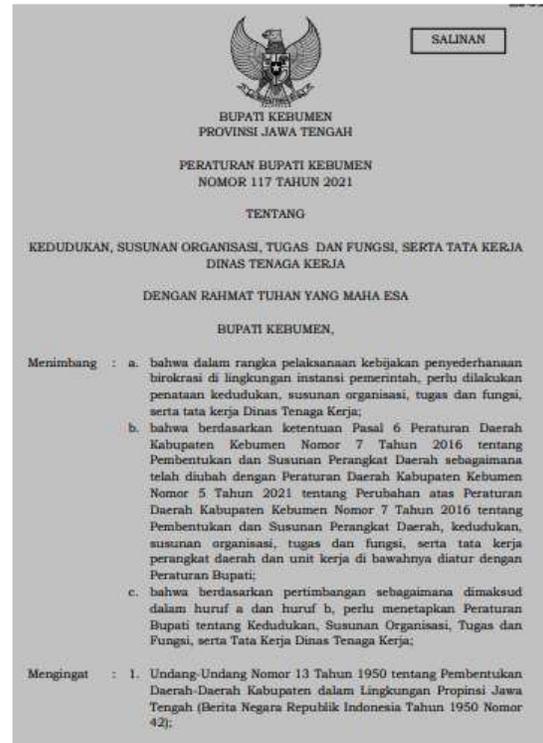
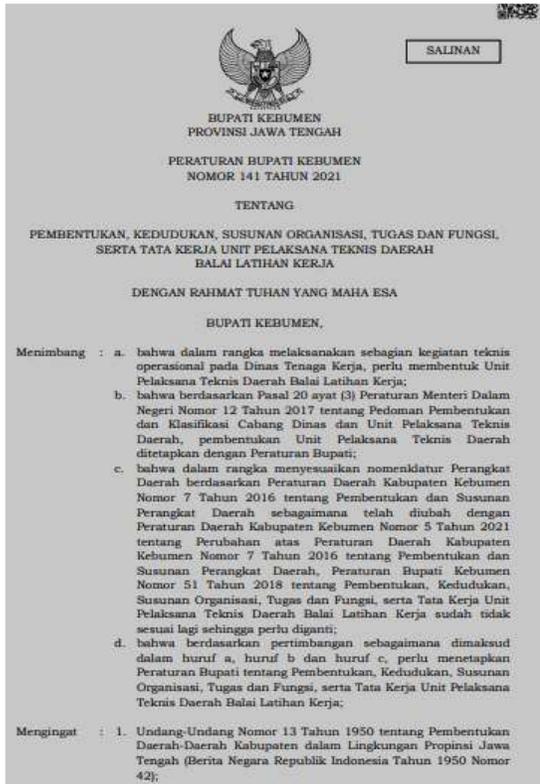
Matrik Kajian Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia			
Peraturan Daerah Sebelum Perubahan	Peraturan Daerah Revisi Perubahan	Kajian Telaah	Keterangan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR..... TAHUN .... TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA		sudah tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR..... TAHUN .... TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA	perubahan istilah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	



# 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI



- ✓ Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- ✓ Namun sampai sudah mengacu ini masih mengacu Perbup no.117 tahun 2021 dan Perda No.5 tahun 2021 yang merupakan revisi Perbup no.71 tahun 2016 dan Perda No.7 tahun 2016





# 4. PENATAAN TATA LAKSANA



<p><b>DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN</b></p>	Nomor SOP : 1 Tanggal Pembuatan : 24 Januari 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 24 Januari 2022 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
	Nama SOP : PEMBUATAN DOKUMEN KERASAMA ANTAR DAERAH (KSAD)
	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Kebumen No. 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

- ✓ Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
- ✓ Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang
- ✓ Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.
- ✓ Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (leaflet, baliho, banner, web dinas, media sosial)

No	INDUK	INDUK	INDUK	INDUK
1	Pengantar surat masuk	080.60706.1	10 Desember 2018	11 Desember 2018
2	Pengantar surat keluar	080.60706.2	10 Desember 2018	11 Desember 2018
3	Pengantar surat keluar masyarakat	080.60706.3	10 Desember 2018	11 Desember 2018
4	Uraian layanan pengantar	080.60706.4	10 Desember 2018	11 Desember 2018
5	Kawatir dan keluhan	080.60706.5	10 Desember 2018	11 Desember 2018
6	Pembuatan surat dan file	080.60706.6	10 Desember 2018	11 Desember 2018
7	Pembuatan surat dan file dan lain-lain	080.60706.7	10 Desember 2018	11 Desember 2018
8	Pembuatan surat dan file pegawai dan perangkat daerah	080.60706.8	10 Desember 2018	11 Desember 2018
9	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.9	10 Desember 2018	11 Desember 2018
10	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.10	10 Desember 2018	11 Desember 2018
11	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.11	10 Desember 2018	11 Desember 2018
12	Layanan pengantar surat dan file	080.60706.12	10 Desember 2018	11 Desember 2018
13	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.13	10 Desember 2018	11 Desember 2018
14	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.14	10 Desember 2018	11 Desember 2018
15	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.15	10 Desember 2018	11 Desember 2018
16	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.16	10 Desember 2018	11 Desember 2018
17	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.17	10 Desember 2018	11 Desember 2018
18	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.18	10 Desember 2018	11 Desember 2018
19	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.19	10 Desember 2018	11 Desember 2018
20	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.20	10 Desember 2018	11 Desember 2018
21	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.21	10 Desember 2018	11 Desember 2018
22	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.22	10 Desember 2018	11 Desember 2018
23	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.23	10 Desember 2018	11 Desember 2018
24	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.24	10 Desember 2018	11 Desember 2018
25	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.25	10 Desember 2018	11 Desember 2018
26	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.26	10 Desember 2018	11 Desember 2018
27	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.27	10 Desember 2018	11 Desember 2018
28	Pembuatan surat dan file pegawai	080.60706.28	10 Desember 2018	11 Desember 2018



# 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

- ✓ Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan
- ✓ Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
- ✓ Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi / diklat / bimtek kepada sebagian besar pegawai
- ✓ Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
- ✓ Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
- ✓ Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan
- ✓ Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya
- ✓ Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
- ✓ Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala
- ✓ Mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat
- ✓ Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS TENAGA KERJA  
Jl. Darmasari No. 39 Pabelan - 35001 (DUWI) KEBUMEN  
Faksimile (0291) 386120-20 atau : 02913861200  
Kubuk - Pabelan.kabupatenkebumen.go.id  
Kata Pohon 36223

ANALISA KEBUTUHAN DILAT  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN  
Triwulan 2022

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Uraian Kompetensi	Uraian Kompetensi	Uraian Kompetensi
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...



REKAPITULASI HASIL PENYUJUKAN DILAT (MUSYAWARAH) 2022

No	Uraian Pekerjaan	Uraian Kompetensi	Uraian Kompetensi	Uraian Kompetensi	Uraian Kompetensi
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

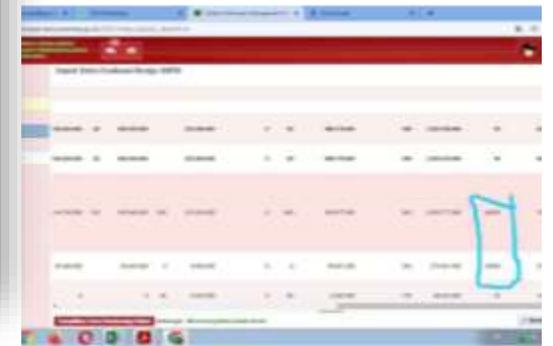


# 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- ✓ Pimpinan Disnaker selalu terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, seperti kegiatan forum Renstra OPD, Penyusunan Renja, Penyusunan Renstra, Rapat penyusunan Anggaran
- ✓ Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala



NO	REVISI						
1							
2							
3							
4							
5							
6							



NO	REVISI						
1							
2							
3							
4							
5							
6							

# 7. PENGUATAN PENGAWASAN

- ✓ Telah dilakukan *public campaign* secara berkala
- ✓ Unit Pengendalian Gratifikasi sudah melaporkan secara berkala ke inspektorat
- ✓ Telah dilaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
- ✓ Terdapat laporan tindak lanjut pada Dinas Tenaga Kerja
- ✓ Telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian
- ✓ Telah menilai sebagian besar risiko
- ✓ Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
- ✓ SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
- ✓ SPI dimonitoring dan evaluasi secara berkala
- ✓ Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
- ✓ Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
- ✓ Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dilaporkan



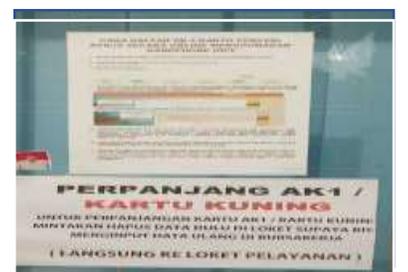
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- ✓ Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik
- ✓ Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders
- ✓ Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/ pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
- ✓ Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
- ✓ Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
- ✓ Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras



# LANJUTAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- ✓ Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
- ✓ Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi
- ✓ Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
- ✓ Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala
- ✓ Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
- ✓ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara *online* (*website*, *media sosial*, dll) dan *offline* .. [skm.kebumenkab.go.id](http://skm.kebumenkab.go.id)
- ✓ Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses



2. TINDAKS

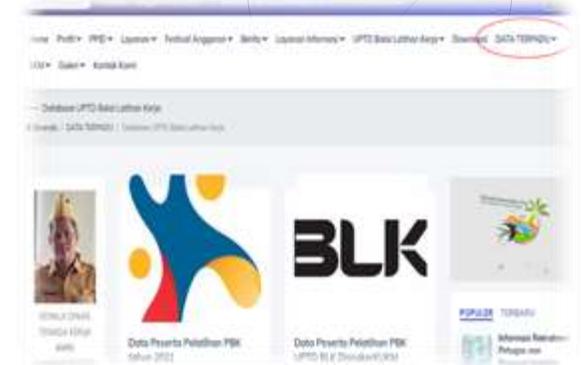
SALAH	RESPONDEN
87.06	

Ada 6 jenis Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, pada triwulan 1 tahun 2022 mendapatkan nilai SKM 87.06 atau kategori Baik.

# Inovasi

- ● ● ●  
pelayanan telah  
mendapatkan pengakuan  
secara internasional  
dan/atau nasional tetapi  
belum direplikasi oleh  
instansi lain:
1. Program Bursa Kerja Kebumen bagi Pencari Kerja "BUKARAJA".
  2. Sinergitas Pengelolaan Kearsipan Melalui Klinik Konseling "klinik Lingsir".
  3. Sistem Informasi Data Terpadu "SI DADU".
  4. Program Unggulan di bidang agama, memiliki mampu menciptakan lapangan kerja "SANTRI MUMPUNI".
  5. Program Bantuan Biaya Pemberangkatan dan Perlindungan PMI "BAYA MANGAP".
  6. Program Pelatihan dan Magang "LANANG".
  7. Pendataan Tenaga Kerja Secara Online

# INOVASI PELAYANAN DISNAKER



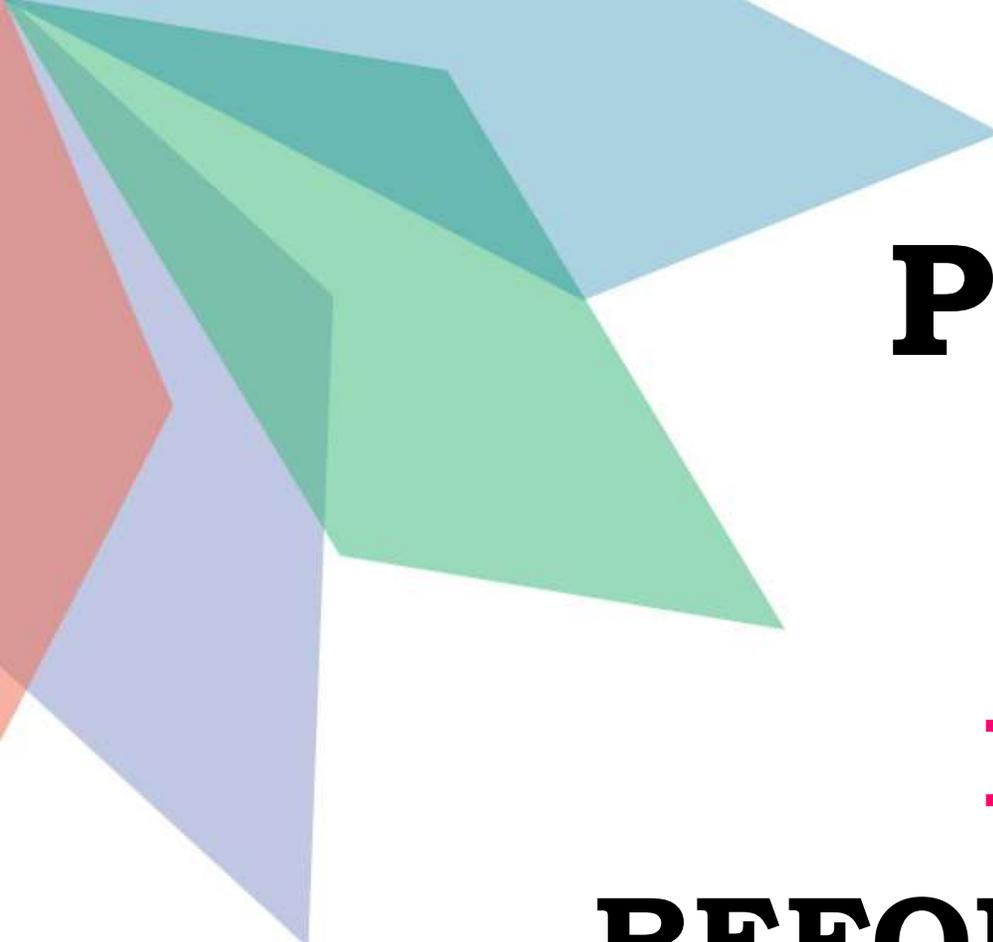
# PROGRAM LAWET MUDA KREATIF



Lawet Muda Kreatif merupakan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yaitu program pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen

## MANFAAT :

- ✓ peningkatan kapasitas tenaga kerja
- ✓ menekan angka pengangguran



# PERMASALAHAN DAN SOLUSI

## PEMENUHAN REFORMASI BIROKRASI



# PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI



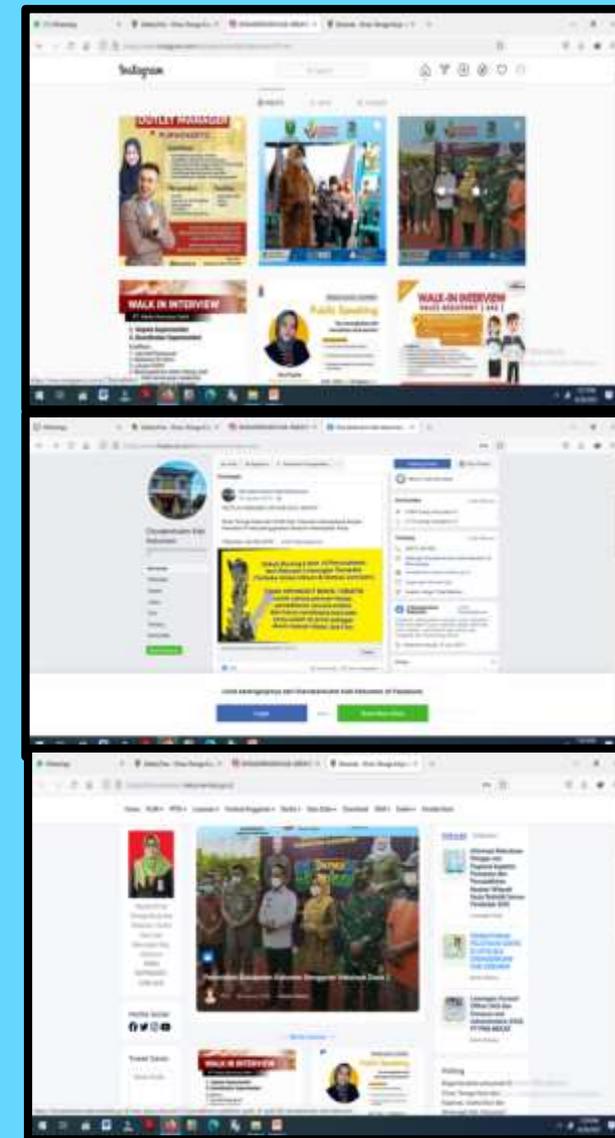
NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>2,00</b>	<b>1,68</b>
	• Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,31
	• Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
	• Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,63
	• Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,33
2	<b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>
	• Harmonisasi	1,00	0,75
3	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	• Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00
	• Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00



# PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI



NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
4	<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>
	• Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,46
	• Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,38
5	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<b>1,40</b>	<b>1, 19</b>
	• Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20
	• Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,17
	• Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,36
	• Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,12
	• Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,14
	• Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20



# PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
6	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
	• Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00
	• Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
7	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	<b>2,20</b>	<b>1,65</b>
	• Gratifikasi	0,30	0,30
	• Penerapan SPIP	0,30	0,25
	• Pengaduan Masyarakat	0,50	0,25
	• <i>Whistle Blowing System</i>	0,30	0,30
	• Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,21
	• Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,33



# PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
8	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,50</b>	<b>2,19</b>
	• Standar Pelayanan	0,40	0,32
	• Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,29
	• Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,48
	• Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	0,70	0,70
	• Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40



NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
A	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	Sebagian tugas Tim RB yang belum terlaksana dapat dilaksanakan
2	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian rencana kerja yang belum di monev dan ditindaklanjuti agar dapat di monev dan ditindaklanjuti
3	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas	Konsensus seluruh assessor mencapai konsensus agar seluruh kriteria dapat dibahas
4	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian rencana kerja yang belum monev dan ditindaklanjuti dan agar dapat ditindaklanjuti
5	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja	<i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal agar dapat memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
<b>B</b>	<b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>		
1	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai	Penyelesaian revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
<b>C.</b>	<b>EVALUASI KELEMBAGAAN</b>		
<b>D</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>		
1.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Prosedur operasional tetap (SOP) dapat diterapkan seluruhnya
2.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti	Hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
E	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>		
1	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh besar pegawai dapat dilaksanakan
2	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan	Agar dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan
3	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala	Monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaksanakan secara berkala
4	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat	Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja
	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM	Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ yang memberikan dampak pengembangan SDM

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN/ PERMASALAHAN</b>	<b>SOLUSI/ TINDAK LANJUT</b>
<b>F</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		
<b>G</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko	Resiko agar di nilai seluruhnya
2.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
3	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
4	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai
5	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
6	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
7	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif	Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
8	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala	Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
J	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
2.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
3	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
4	Telah terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN/PERMASALAHAN</b>	<b>SOLUSI/TINDAK LANJUT</b>
<b>J</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
2.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
3	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
4	Telah terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain
5.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
6.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala



# PERMASALAHAN DAN SOLUSI

## REFORM

# REFORMASI BIROKRASI



# REFORM - REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,75
	• Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50
	• Komitmen Pimpinan	1,00	075
	• Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00
	• Peran Kebijakan	2,00	2,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	0,75
	• Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	0,75



# REFORM - REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
4	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>	<b>3,75</b>	<b>2,63</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan</li> </ul>	0,50	0,50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi</li> </ul>	1,25	0,63
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat</li> </ul>	2,00	1,50
5	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Individu</li> </ul>	1,00	0,50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assessment Pegawai</li> </ul>	0,50	0,25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggaran Disiplin Pegawai</li> </ul>	0,50	0,50



NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
<b>6</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	<b>3,75</b>	<b>3,39</b>
	• Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,97
	• Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas	1,00	1,00
	• Pemberian Reward and Punishment	1,00	1,00
	• Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75
<b>7</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
	• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75
	• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60
	• Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60
<b>8</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
	• Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
	• Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN/ PERMASALAHAN</b>	<b>SOLUSI/TINDAK LANJUT</b>
<b>A</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
<b>C.</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>		
1	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan	Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
D	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>		
1	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
2	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
3	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Kriteria terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.	Kriteria terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
E	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>		
1	Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
F	<b>PENGUATAN AKUANTABILITAS</b>		
1	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja	Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>
2	Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	93,88%	100 %
3	Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai



# Terimakasih

- **Disnaker Kabupaten Kebumen**
- **[disnakerkabkebumen@kebumenkab.go.id](mailto:disnakerkabkebumen@kebumenkab.go.id)**
- **<https://disnaker.kebumenkab.go.id>**



**Jl. Cendrawasih Nomor 28  
Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54311**